

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 138 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan sebagai unit organisasi yang memberikan pelayanan pendidikan di masyarakat membutuhkan susunan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal meliputi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
8. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.



9. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
13. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan pada Daerah yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
16. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal pada unit pelaksana teknis/unit pelaksana teknis Daerah dan Satuan Pendidikan Nonformal.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD berupa Satuan Pendidikan pada Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal.
- (3) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. TK Negeri;
 - b. SD Negeri; dan
 - c. SMP Negeri.
- (4) Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SKB.
- (5) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan unsur pelaksana teknis operasional dalam pengelolaan TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi TK Negeri terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas sebagai Kepala.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan mengelola TK Negeri.
- (4) Bagan susunan organisasi TK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi SD Negeri terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas sebagai Kepala.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan memimpin dan mengelola SD Negeri.
- (4) Bagan susunan organisasi SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 6

- (1) Susunan organisasi SMP Negeri terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas sebagai Kepala.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan mengelola SMP Negeri.
- (4) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi Satuan Pendidikan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Guru; dan
 - b. Pustakawan.
- (7) Bagan susunan organisasi SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) TK Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan anak meliputi program layanan taman kanak-kanak untuk peserta didik usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TK Negeri menyelenggarakan fungsi pembinaan dan penumbuhkembangan seluruh potensi anak secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Pasal 8

- (1) SD Negeri mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 6 (enam) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua);
 - c. kelas 3 (tiga);
 - d. kelas 4 (empat);
 - e. kelas 5 (lima); dan
 - f. kelas 6 (enam).



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SD Negeri mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi.

Pasal 9

- (1) SMP Negeri mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. kelas 7 (tujuh);
 - b. kelas 8 (delapan); dan
 - c. kelas 9 (sembilan).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMP Negeri mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi.

BAB IV SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 10

- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.
- (2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi SKB terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.
- (3) Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan mengelola SKB.
- (4) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.



- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pamong Belajar dan Jabatan Fungsional lainnya untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Program Pendidikan Nonformal.
- (6) Bagan susunan organisasi SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 12

SKB mempunyai tugas menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, SKB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pendidikan nonformal;
- b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan administrasi pada SKB.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Di lingkungan Satuan Pendidikan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

Setiap unsur di lingkungan Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.

Pasal 18

Setiap unsur di lingkungan Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 19

- (1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan, pejabat fungsional dan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Pendidikan dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka percepatan dan efektivitas koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di wilayah Daerah, dibentuk koordinator wilayah bidang pendidikan sebagai unit kerja non struktural.
- (2) Koordinator wilayah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, pembagian wilayah kerja, tugas dan mekanisme penunjukan koordinator wilayah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.



BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain jabatan Kepala Satuan Pendidikan dan Jabatan Fungsional pada Satuan Pendidikan terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Satuan Pendidikan yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Satuan Pendidikan yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Satuan Pendidikan yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 138 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA SATUAN PENDIDIKAN

A. DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
1.	Taman Kanak-Kanak Negeri	1. TK NEGERI PEMBINA KEBUMEN
		2. TK NEGERI PEMBINA KUWARASAN
2.	Sekolah Dasar Negeri	1. SD NEGERI ADIKARTO
		2. SD NEGERI CANDIWULAN
		3. SD NEGERI 1 ADILUHUR
		4. SD NEGERI CARUBAN
		5. SD NEGERI PEKUWON
		6. SD NEGERI SEKARTEJA
		7. SD NEGERI TEMANGGAL
		8. SD NEGERI SIDOMUKTI
		9. SD NEGERI 1 ADIMULYO
		10. SD NEGERI 2 ADIMULYO
		11. SD NEGERI 1 BANYUROTO
		12. SD NEGERI 2 BANYUROTO
		13. SD NEGERI ARJOMULYO
		14. SD NEGERI BONJOK
		15. SD NEGERI JOHO
		16. SD NEGERI MANGUNHARJO
		17. SD NEGERI MELES
		18. SD NEGERI SUGIHWARAS
		19. SD NEGERI TAMBAHARJO
		20. SD NEGERI WAJASARI
		21. SD NEGERI 2 TEGALSARI
		22. SD NEGERI ARJOSARI
		23. SD NEGERI SIDOMULYO
		24. SD NEGERI TEPAKYANG
		25. SD NEGERI 1 KEMUJAN
		26. SD NEGERI 1 SAWANGAN
		27. SD NEGERI 2 SAWANGAN
		28. SD NEGERI 3 SAWANGAN
		29. SD NEGERI 1 BOJONGSARI
		30. SD NEGERI 2 BOJONGSARI
		31. SD NEGERI KALIPUTIH



NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
		32. SD NEGERI 1 KRAKAL
		33. SD NEGERI 2 KRAKAL
		34. SD NEGERI 3 KRAKAL
		35. SD NEGERI 4 KRAKAL
		36. SD NEGERI JATIMULYO
		37. SD NEGERI 1 KALIJOYO
		38. SD NEGERI 2 KALIJOYO
		39. SD NEGERI 1 KALIRANCANG
		40. SD NEGERI 2 KALIRANCANG
		41. SD NEGERI 3 KALIRANCANG
		42. SD NEGERI 1 KARANGKEMBANG
		43. SD NEGERI 2 KARANGKEMBANG
		44. SD NEGERI 1 SELILING
		45. SD NEGERI 2 SELILING
		46. SD NEGERI 3 SELILING
		47. SD NEGERI 1 KEMANGGUAN
		48. SD NEGERI 2 KEMANGGUAN
		49. SD NEGERI TANUHARJO
		50. SD NEGERI 1 KARANGTANJUNG
		51. SD NEGERI 1 SUROTRUNAN
		52. SD NEGERI 2 SUROTRUNAN
		53. SD NEGERI 1 WONOKROMO
		54. SD NEGERI 2 WONOKROMO
		55. SD NEGERI 3 WONOKROMO
		56. SD NEGERI 2 TLOGOWULUNG
		57. SD NEGERI KAMBANGSARI
		58. SD NEGERI 1 PAGEDANGAN
		59. SD NEGERI KENOYOJAYAN
		60. SD NEGERI BANJARSARI
		61. SD NEGERI KAIBON
		62. SD NEGERI KRADENAN
		63. SD NEGERI PETANGKURAN
		64. SD NEGERI SIDOREJO
		65. SD NEGERI 2 SIDOLUHUR
		66. SD NEGERI 3 SIDOLUHUR
		67. SD NEGERI AMBALKEBREK
		68. SD NEGERI AMBARWINANGUN
		69. SD NEGERI ENTAK
		70. SD NEGERI KEMBANGSAWIT
		71. SD NEGERI LAJER
		72. SD NEGERI PASARSENEN
		73. SD NEGERI PENEKET
		74. SD NEGERI SINGOSARI
		75. SD NEGERI SUMBERJATI
		76. SD NEGERI BENERKULON



NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
		77. SD NEGERI PLEMPUKANKEMBARAN
		78. SD NEGERI PUCANGAN
		79. SD NEGERI REJOSARI
		80. SD NEGERI SIDOMULYO
		81. SD NEGERI SURABAYAN
		82. SD NEGERI 1 AMBALRESMI
		83. SD NEGERI 2 AMBALRESMI
		84. SD NEGERI AMBALKLIWONAN
		85. SD NEGERI BLENGORKULON
		86. SD NEGERI BLENGORWETAN
		87. SD NEGERI PRASUTAN
		88. SD NEGERI 1 GONDANGLEGI
		89. SD NEGERI 2 GONDANGLEGI
		90. SD NEGERI 2 SINUNGREJO
		91. SD NEGERI SIDOMUKTI
		92. SD NEGERI BENERWETAN
		93. SD NEGERI KARANGDUWUR
		94. SD NEGERI 2 KARANGDUWUR
		95. SD NEGERI 1 JATIJAJAR
		96. SD NEGERI 4 JATIJAJAR
		97. SD NEGERI 1 TLOGOSARI
		98. SD NEGERI 2 TLOGOSARI
		99. SD NEGERI MANGUNWENI
		100. SD NEGERI 3 MANGUNWENI
		101. SD NEGERI 1 DEMANGSARI
		102. SD NEGERI 3 DEMANGSARI
		103. SD NEGERI 1 CANDIRENGGO
		104. SD NEGERI 2 CANDIRENGGO
		105. SD NEGERI 3 CANDIRENGGO
		106. SD NEGERI 1 JINTUNG
		107. SD NEGERI 2 JINTUNG
		108. SD NEGERI 1 WATUKELIR
		109. SD NEGERI KEDUNGWERU
		110. SD NEGERI 1 SRATI
		111. SD NEGERI 2 SRATI
		112. SD NEGERI ARGOPENI
		113. SD NEGERI ARGOSARI
		114. SD NEGERI KALIBANGKANG
		115. SD NEGERI PASIR
		116. SD NEGERI BULUREJO
		117. SD NEGERI 1 BANJARARJO
		118. SD NEGERI 2 BANJARARJO
		119. SD NEGERI AYAH
		120. SD NEGERI KALIPOH
		121. SD NEGERI 1 MRENTUL



NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
		122. SD NEGERI 3 MRENTUL
		123. SD NEGERI 1 BONJOKLOR
		124. SD NEGERI 3 BONJOKLOR
		125. SD NEGERI 4 BONJOKLOR
		126. SD NEGERI 1 PUJODADI
		127. SD NEGERI 1 NGASINAN
		128. SD NEGERI 2 NGASINAN
		129. SD NEGERI 2 PUJODADI
		130. SD NEGERI 1 PATUKREJO
		131. SD NEGERI 3 PATUKREJO
		132. SD NEGERI BONJOKKIDUL
		133. SD NEGERI BONOROWO
		134. SD NEGERI ROWOSARI
		135. SD NEGERI TLOGOREJO
		136. SD NEGERI BALOREJO
		137. SD NEGERI SIRNOBOYO
		138. SD NEGERI 1 BUAYAN
		139. SD NEGERI 1 SIKAYU
		140. SD NEGERI 2 SIKAYU
		141. SD NEGERI 4 SIKAYU
		142. SD NEGERI 1 NOGORAJI
		143. SD NEGERI 2 NOGORAJI
		144. SD NEGERI 3 NOGORAJI
		145. SD NEGERI SEMAMPIR
		146. SD NEGERI 2 PURBOWANGI
		147. SD NEGERI 3 PURBOWANGI
		148. SD NEGERI 4 PURBOWANGI
		149. SD NEGERI 1 BANYUMUDAL
		150. SD NEGERI 2 BANYUMUDAL
		151. SD NEGERI 1 JATIROTO
		152. SD NEGERI 2 JATIROTO
		153. SD NEGERI 3 JATIROTO
		154. SD NEGERI 1 JLADRI
		155. SD NEGERI 2 JLADRI
		156. SD NEGERI 2 ROGODONO
		157. SD NEGERI KARANGSARI
		158. SD NEGERI 1 TUGU
		159. SD NEGERI 3 TUGU
		160. SD NEGERI 1 MERGOSONO
		161. SD NEGERI 2 MERGOSONO
		162. SD NEGERI ADIWARNO
		163. SD NEGERI ROGODADI
		164. SD NEGERI 1 JOGOMULYO
		165. SD NEGERI 2 JOGOMULYO
		166. SD NEGERI GEBLUG



NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
		167. SD NEGERI KARANGBOLONG
		168. SD NEGERI WONODADI
		169. SD NEGERI RANGKAH
		170. SD NEGERI PAKURAN
		171. SD NEGERI 1 BRECONG
		172. SD NEGERI 2 BRECONG
		173. SD NEGERI 1 SIDOMORO
		174. SD NEGERI 2 SIDOMORO
		175. SD NEGERI AYAMPUTIH
		176. SD NEGERI TAMBAKREJO
		177. SD NEGERI MADURETNO
		178. SD NEGERI TANJUNGREJO
		179. SD NEGERI 1 BOCOR
		180. SD NEGERI 2 BOCOR
		181. SD NEGERI 1 JOGOPATEN
		182. SD NEGERI 2 JOGOPATEN
		183. SD NEGERI 1 KLAPASAWIT
		184. SD NEGERI 2 KLAPASAWIT
		185. SD NEGERI 3 KLAPASAWIT
		186. SD NEGERI BANJURMUKADAN
		187. SD NEGERI BULUSPESANTREN
		188. SD NEGERI RANTEWRINGIN
		189. SD NEGERI ARJOWINANGUN
		190. SD NEGERI 1 SANGUBANYU
		191. SD NEGERI 2 SANGUBANYU
		192. SD NEGERI 1 SETROJENAR
		193. SD NEGERI 2 SETROJENAR
		194. SD NEGERI 2 WALUYO
		195. SD NEGERI AMPIH
		196. SD NEGERI INDROSARI
		197. SD NEGERI AMBALKUMOLO
		198. SD NEGERI TANJUNGSARI
		199. SD NEGERI 2 BANJURPASAR
		200. SD NEGERI PATEMON
		201. SD NEGERI 1 GOMBONG
		202. SD NEGERI 2 GOMBONG
		203. SD NEGERI 3 GOMBONG
		204. SD NEGERI 5 GOMBONG
		205. SD NEGERI 1 PANJANGSARI
		206. SD NEGERI 1 SIDAYU
		207. SD NEGERI 2 SIDAYU
		208. SD NEGERI 1 WONOKRIYO
		209. SD NEGERI 2 WONOKRIYO
		210. SD NEGERI 1 KALITENGAH
		211. SD NEGERI 2 KALITENGAH



NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
		212. SD NEGERI 3 KALITENGAH
		213. SD NEGERI KEDUNGPUJI
		214. SD NEGERI KEMUKUS
		215. SD NEGERI KLOPOGODO
		216. SD NEGERI SEMONDO
		217. SD NEGERI WERO
		218. SD NEGERI BANJARSARI
		219. SD NEGERI WONOSIGRO
		220. SD NEGERI 1 SEMANDING
		221. SD NEGERI 2 SEMANDING
		222. SD NEGERI 1 KARANGANYAR
		223. SD NEGERI 2 KARANGANYAR
		224. SD NEGERI 4 KARANGANYAR
		225. SD NEGERI 1 CANDI
		226. SD NEGERI 2 CANDI
		227. SD NEGERI 2 GIRIPURNO
		228. SD NEGERI 3 GIRIPURNO
		229. SD NEGERI 1 WONOREJO
		230. SD NEGERI 2 WONOREJO
		231. SD NEGERI 3 WONOREJO
		232. SD NEGERI 1 GRENGGENG
		233. SD NEGERI 2 GRENGGENG
		234. SD NEGERI 3 GRENGGENG
		235. SD NEGERI 1 KARANGKEMIRI
		236. SD NEGERI 1 PLARANGAN
		237. SD NEGERI 2 PLARANGAN
		238. SD NEGERI 3 PLARANGAN
		239. SD NEGERI 1 POHKUMBANG
		240. SD NEGERI 2 POHKUMBANG
		241. SD NEGERI PANJATAN
		242. SD NEGERI SIDOMULYO
		243. SD NEGERI 1 JATILUHUR
		244. SD NEGERI 3 JATILUHUR
		245. SD NEGERI 1 GIRITIRTO
		246. SD NEGERI 2 GIRITIRTO
		247. SD NEGERI 3 GIRITIRTO
		248. SD NEGERI 1 KALIREJO
		249. SD NEGERI 2 KALIREJO
		250. SD NEGERI 1 KARANGGAYAM
		251. SD NEGERI 2 KARANGGAYAM
		252. SD NEGERI 3 KARANGGAYAM
		253. SD NEGERI 1 KALIBENING
		254. SD NEGERI 2 KALIBENING
		255. SD NEGERI 1 SELOGIRI
		256. SD NEGERI 2 SELOGIRI



NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
		257. SD NEGERI 3 SELOGIRI
		258. SD NEGERI 4 SELOGIRI
		259. SD NEGERI PENIMBUN
		260. SD NEGERI PURWOSARI
		261. SD NEGERI KARANGMOJO
		262. SD NEGERI 1 GUNUNGSARI
		263. SD NEGERI 2 GUNUNGSARI
		264. SD NEGERI 1 KEBAKALAN
		265. SD NEGERI 2 KEBAKALAN
		266. SD NEGERI 1 LOGANDU
		267. SD NEGERI 2 LOGANDU
		268. SD NEGERI 3 LOGANDU
		269. SD NEGERI 1 WONOTIRTO
		270. SD NEGERI 2 WONOTIRTO
		271. SD NEGERI CLAPAR
		272. SD NEGERI 1 KAJORAN
		273. SD NEGERI 2 KAJORAN
		274. SD NEGERI KARANGREJO
		275. SD NEGERI 1 BINANGUN
		276. SD NEGERI 2 BINANGUN
		277. SD NEGERI GINANDONG
		278. SD NEGERI GLONTOR
		279. SD NEGERI KRADENAN
		280. SD NEGERI PAGEBANAN
		281. SD NEGERI KARANGTENGAH
		282. SD NEGERI KEDUNGWARU
		283. SD NEGERI 1 PLUMBON
		284. SD NEGERI 2 PLUMBON
		285. SD NEGERI 3 PLUMBON
		286. SD NEGERI 1 WADASMALANG
		287. SD NEGERI 2 WADASMALANG
		288. SD NEGERI 3 WADASMALANG
		289. SD NEGERI BANIORO
		290. SD NEGERI EROGEMIWANG
		291. SD NEGERI KALIGENDING
		292. SD NEGERI PENCIL
		293. SD NEGERI TOTOGAN
		294. SD NEGERI 1 KALIKUDU
		295. SD NEGERI 2 KALIKUDU
		296. SD NEGERI 1 LANGSE
		297. SD NEGERI 2 LANGSE
		298. SD NEGERI 1 KARANGSAMBUNG
		299. SD NEGERI 3 KARANGSAMBUNG
		300. SD NEGERI KALIPURU
		301. SD NEGERI PESAWAHAN



NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
		302. SD NEGERI PUJEGAN
		303. SD NEGERI 1 WIDORO
		304. SD NEGERI 2 WIDORO
		305. SD NEGERI KALISONO
		306. SD NEGERI SELING
		307. SD NEGERI TLEPOK
		308. SD NEGERI 1 GEMEKSEKTI
		309. SD NEGERI 2 GEMEKSEKTI
		310. SD NEGERI 1 PANJER
		311. SD NEGERI 2 PANJER
		312. SD NEGERI 5 PANJER
		313. SD NEGERI 6 PANJER
		314. SD NEGERI 1 TAMANWINANGUN
		315. SD NEGERI 2 TAMANWINANGUN
		316. SD NEGERI 3 TAMANWINANGUN
		317. SD NEGERI 4 TAMANWINANGUN
		318. SD NEGERI 1 BUMIREJO
		319. SD NEGERI 2 BUMIREJO
		320. SD NEGERI 4 BUMIREJO
		321. SD NEGERI 5 BUMIREJO
		322. SD NEGERI 1 KUTOSARI
		323. SD NEGERI 4 KUTOSARI
		324. SD NEGERI 5 KUTOSARI
		325. SD NEGERI 1 KEBUMEN
		326. SD NEGERI 2 KEBUMEN
		327. SD NEGERI 5 KEBUMEN
		328. SD NEGERI 7 KEBUMEN
		329. SD NEGERI 1 TANAHSAARI
		330. SD NEGERI 2 TANAHSAARI
		331. SD NEGERI 1 CANDIWULAN
		332. SD NEGERI 2 CANDIWULAN
		333. SD NEGERI 1 JATISARI
		334. SD NEGERI 2 JATISARI
		335. SD NEGERI 3 JATISARI
		336. SD NEGERI JEMUR
		337. SD NEGERI KEMBARAN
		338. SD NEGERI MENGKOWO
		339. SD NEGERI 1 GESIKAN
		340. SD NEGERI 1 KALIBAGOR
		341. SD NEGERI 2 KALIBAGOR
		342. SD NEGERI 1 SELANG
		343. SD NEGERI 3 SELANG
		344. SD NEGERI 1 WONOSARI
		345. SD NEGERI 2 WONOSARI
		346. SD NEGERI 3 WONOSARI



NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
		347. SD NEGERI DEPOKREJO
		348. SD NEGERI SUMBERADI
		349. SD NEGERI 1 ADIKARSO
		350. SD NEGERI 2 ADIKARSO
		351. SD NEGERI 1 BANDUNG
		352. SD NEGERI 2 BANDUNG
		353. SD NEGERI 2 KALIREJO
		354. SD NEGERI 3 KALIREJO
		355. SD NEGERI ARGOPENI
		356. SD NEGERI CANDIMULYO
		357. SD NEGERI KAWEDUSAN
		358. SD NEGERI MUKTISARI
		359. SD NEGERI MURTIREJO
		360. SD NEGERI KALIJIREK
		361. SD NEGERI ROWOREJO
		362. SD NEGERI 1 KARANGSARI
		363. SD NEGERI 2 KARANGSARI
		364. SD NEGERI 1 BUMIHARJO
		365. SD NEGERI 3 BUMIHARJO
		366. SD NEGERI 1 DOROWATI
		367. SD NEGERI 3 DOROWATI
		368. SD NEGERI 1 GEBANGSARI
		369. SD NEGERI 2 GEBANGSARI
		370. SD NEGERI 1 JOGOSIMO
		371. SD NEGERI 1 KEBADONGAN
		372. SD NEGERI 2 KEBADONGAN
		373. SD NEGERI 1 KEDUNGSARI
		374. SD NEGERI 3 KEDUNGSARI
		375. SD NEGERI 1 KEDUNGWINANGUN
		376. SD NEGERI 3 KEDUNGWINANGUN
		377. SD NEGERI 1 KLIRONG
		378. SD NEGERI 2 KLIRONG
		379. SD NEGERI 1 PODOLUHUR
		380. SD NEGERI 1 TAMBAKAGUNG
		381. SD NEGERI 2 TAMBAKAGUNG
		382. SD NEGERI 1 TANGGULANGIN
		383. SD NEGERI 2 TANGGULANGIN
		384. SD NEGERI BENDOGARAP
		385. SD NEGERI GADUNGREJO
		386. SD NEGERI JATIMALANG
		387. SD NEGERI KALIWUNGU
		388. SD NEGERI KLEGENREJO
		389. SD NEGERI KLEGENWONOSARI
		390. SD NEGERI PANDANLOR
		391. SD NEGERI RANTEREJO



NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
		392. SD NEGERI SITIREJO
		393. SD NEGERI TAMBAKPROGATEN
		394. SD NEGERI WOTBUWONO
		395. SD NEGERI JERUKAGUNG
		396. SD NEGERI TANJUNGMERU
		397. SD NEGERI 1 JLEGIWINANGUN
		398. SD NEGERI 2 JLEGIWINANGUN
		399. SD NEGERI 1 KARANGSARI
		400. SD NEGERI 2 KARANGSARI
		401. SD NEGERI 1 KOROWELANG
		402. SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN
		403. SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN
		404. SD NEGERI 1 KUWARISAN
		405. SD NEGERI 2 KUWARISAN
		406. SD NEGERI 3 KUWARISAN
		407. SD NEGERI 1 LUMBU
		408. SD NEGERI 2 LUMBU
		409. SD NEGERI 1 LUNDONG
		410. SD NEGERI 2 LUNDONG
		411. SD NEGERI 1 MEKARSARI
		412. SD NEGERI 2 MEKARSARI
		413. SD NEGERI 1 PEJAGATAN
		414. SD NEGERI 2 PEJAGATAN
		415. SD NEGERI 1 TRIWARNO
		416. SD NEGERI 2 TRIWARNO
		417. SD NEGERI BABADSARI
		418. SD NEGERI KALIPUTIH
		419. SD NEGERI MRINEN
		420. SD NEGERI PEKUNDEN
		421. SD NEGERI PESALAKAN
		422. SD NEGERI TANJUNGSARI
		423. SD NEGERI TUNJUNGSETO
		424. SD NEGERI UNGARAN
		425. SD NEGERI 1 BANJAREJA
		426. SD NEGERI 3 BANJAREJA
		427. SD NEGERI 1 GUNUNGMUJIL
		428. SD NEGERI 2 GUNUNGMUJIL
		429. SD NEGERI 3 GUNUNGMUJIL
		430. SD NEGERI 1 KUWARASAN
		431. SD NEGERI 2 KUWARASAN
		432. SD NEGERI 1 LEMAH DUWUR
		433. SD NEGERI 1 PURWOGONDO
		434. SD NEGERI 3 PURWOGONDO
		435. SD NEGERI 1 SAWANGAN
		436. SD NEGERI 1 SIDOMUKTI



NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
		437. SD NEGERI 2 SIDOMUKTI
		438. SD NEGERI 1 WONOYOSO
		439. SD NEGERI 2 WONOYOSO
		440. SD NEGERI BENDUNGAN
		441. SD NEGERI GANDUSARI
		442. SD NEGERI GUMAWANG
		443. SD NEGERI HARJODOWO
		444. SD NEGERI JATIMULYO
		445. SD NEGERI KAMULYAN
		446. SD NEGERI KUWARU
		447. SD NEGERI MADURESO
		448. SD NEGERI MANGLI
		449. SD NEGERI ORI
		450. SD NEGERI PONDOKGEBANGSARI
		451. SD NEGERI PURWODADI
		452. SD NEGERI SERUT
		453. SD NEGERI TAMBAKSARI
		454. SD NEGERI 1 ABEAN
		455. SD NEGERI 2 ABEAN
		456. SD NEGERI 3 ABEAN
		457. SD NEGERI 1 KERTODESO
		458. SD NEGERI 2 KERTODESO
		459. SD NEGERI 1 LEMBUPURWO
		460. SD NEGERI 2 LEMBUPURWO
		461. SD NEGERI 1 PATUKGAWEMULYO
		462. SD NEGERI 2 PATUKGAWEMULYO
		463. SD NEGERI 1 PEKUTAN
		464. SD NEGERI 2 PEKUTAN
		465. SD NEGERI 1 SARWOGADUNG
		466. SD NEGERI 2 SARWOGADUNG
		467. SD NEGERI 1 SELOTUMPENG
		468. SD NEGERI 1 TLOGODEPOK
		469. SD NEGERI 2 TLOGODEPOK
		470. SD NEGERI 1 TLOGOPRAGOTO
		471. SD NEGERI 1 WERGONAYAN
		472. SD NEGERI KARANGGEDE
		473. SD NEGERI KRUBUNGAN
		474. SD NEGERI MANGUNRANAN
		475. SD NEGERI MIRIT
		476. SD NEGERI MIRITPETIKUSAN
		477. SD NEGERI PATUKREJOMULYO
		478. SD NEGERI ROWO
		479. SD NEGERI SINGOYUDAN
		480. SD NEGERI SITIBENTAR
		481. SD NEGERI WINONG



NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
		482. SD NEGERI WIROGATEN
		483. SD NEGERI WIROMARTAN
		484. SD NEGERI 1 MERDEN
		485. SD NEGERI 2 MERDEN
		486. SD NEGERI 1 BALINGASAL
		487. SD NEGERI 2 BALINGASAL
		488. SD NEGERI KALIGUBUG
		489. SD NEGERI KALIJERING
		490. SD NEGERI 1 PADURESO
		491. SD NEGERI 2 PADURESO
		492. SD NEGERI PEJENGKOLAN
		493. SD NEGERI RAHAYU
		494. SD NEGERI SENDANGDALEM
		495. SD NEGERI SIDOTOTO
		496. SD NEGERI 1 KARANGPOH
		497. SD NEGERI 2 KARANGPOH
		498. SD NEGERI 1 KEDAWUNG
		499. SD NEGERI 4 KEDAWUNG
		500. SD NEGERI 1 KUWAYUHAN
		501. SD NEGERI 2 KUWAYUHAN
		502. SD NEGERI 3 KUWAYUHAN
		503. SD NEGERI 4 KUWAYUHAN
		504. SD NEGERI 1 LOGEDE
		505. SD NEGERI 2 LOGEDE
		506. SD NEGERI 1 PEJAGOAN
		507. SD NEGERI 2 PEJAGOAN
		508. SD NEGERI 4 PEJAGOAN
		509. SD NEGERI 1 PRIGI
		510. SD NEGERI 2 PRIGI
		511. SD NEGERI 2 KEBULUSAN
		512. SD NEGERI 3 KEBULUSAN
		513. SD NEGERI ADITIRTO
		514. SD NEGERI JEMUR
		515. SD NEGERI KEBAGORAN
		516. SD NEGERI PENGARINGAN
		517. SD NEGERI PENIRON
		518. SD NEGERI WATULAWANG
		519. SD NEGERI 1 MUNGGU
		520. SD NEGERI 1 KARANGGADUNG
		521. SD NEGERI 2 KARANGGADUNG
		522. SD NEGERI 1 BANJARWINANGUN
		523. SD NEGERI 1 JATIMULYO
		524. SD NEGERI 1 JOGOMERTAN
		525. SD NEGERI 1 KARANGDUWUR
		526. SD NEGERI 3 KARANGDUWUR



NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
		527. SD NEGERI 4 KARANGDUWUR
		528. SD NEGERI 1 KARANGREJO
		529. SD NEGERI 3 KARANGREJO
		530. SD NEGERI 1 KEWANGUNAN
		531. SD NEGERI 2 KEWANGUNAN
		532. SD NEGERI 1 KRITIG
		533. SD NEGERI 2 KRITIG
		534. SD NEGERI 1 PETANAHAH
		535. SD NEGERI 3 PETANAHAH
		536. SD NEGERI 2 JATIMULYO
		537. SD NEGERI 2 JOGOMERTAN
		538. SD NEGERI AMPELSARI
		539. SD NEGERI GROGOL BENINGSARI
		540. SD NEGERI GROGOLPENATUS
		541. SD NEGERI GRUJUGAN
		542. SD NEGERI KEBONSARI
		543. SD NEGERI NAMPUDADI
		544. SD NEGERI PODOURIP
		545. SD NEGERI SIDOMULYO
		546. SD NEGERI TANJUNGSARI
		547. SD NEGERI TEGALRETNO
		548. SD NEGERI TRESNOREJO
		549. SD NEGERI PONCOWARNO
		550. SD NEGERI TEGALREJO
		551. SD NEGERI 1 JEMBANGAN
		552. SD NEGERI 2 JEMBANGAN
		553. SD NEGERI 1 KARANGTENGAH
		554. SD NEGERI 2 KARANGTENGAH
		555. SD NEGERI BLATER
		556. SD NEGERI KEBAPANGAN
		557. SD NEGERI SOKA
		558. SD NEGERI TIRTOMOYO
		559. SD NEGERI JATIPURUS
		560. SD NEGERI LEREPEKUBUMEN
		561. SD NEGERI 1 KABEKELAN
		562. SD NEGERI 2 KABEKELAN
		563. SD NEGERI 1 MULYOSRI
		564. SD NEGERI 2 MULYOSRI
		565. SD NEGERI 1 PESUNINGAN
		566. SD NEGERI 2 PESUNINGAN
		567. SD NEGERI 1 PREMBUN
		568. SD NEGERI 2 PREMBUN
		569. SD NEGERI 3 PREMBUN
		570. SD NEGERI 4 PREMBUN
		571. SD NEGERI 1 SIDOGEDE



NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
		572. SD NEGERI 2 SIDOGEDE
		573. SD NEGERI 1 TERSOBO
		574. SD NEGERI 2 TERSOBO
		575. SD NEGERI 3 TERSOBO
		576. SD NEGERI 1 TUNGALROSO
		577. SD NEGERI 2 TUNGALROSO
		578. SD NEGERI BAGUNG
		579. SD NEGERI KABUARAN
		580. SD NEGERI KEDUNGBULUS
		581. SD NEGERI KEDUNGWARU
		582. SD NEGERI PECARIKAN
		583. SD NEGERI SEMBIRKADIPATEN
		584. SD NEGERI 1 BANJAREJO
		585. SD NEGERI 2 BANJAREJO
		586. SD NEGERI 3 BANJAREJO
		587. SD NEGERI 1 BUMIREJO
		588. SD NEGERI 2 BUMIREJO
		589. SD NEGERI 1 KALENG
		590. SD NEGERI 2 KALENG
		591. SD NEGERI 1 KEDALEMAN WETAN
		592. SD NEGERI 2 KEDALEMAN WETAN
		593. SD NEGERI 1 KRANDEGAN
		594. SD NEGERI 2 KRANDEGAN
		595. SD NEGERI 1 PULIHARJO
		596. SD NEGERI 2 PULIHARJO
		597. SD NEGERI 1 PURWOSARI
		598. SD NEGERI 2 PURWOSARI
		599. SD NEGERI 1 SIDOBUNDER
		600. SD NEGERI 2 SIDOBUNDER
		601. SD NEGERI 1 SIDOHARJO
		602. SD NEGERI 2 SIDOHARJO
		603. SD NEGERI 1 SITIADI
		604. SD NEGERI 3 SITIADI
		605. SD NEGERI 1 SUROREJAN
		606. SD NEGERI 2 SUROREJAN
		607. SD NEGERI 1 TAMBAKMULYO
		608. SD NEGERI 2 TAMBAKMULYO
		609. SD NEGERI 3 TAMBAKMULYO
		610. SD NEGERI 1 WALUYOREJO
		611. SD NEGERI 2 WALUYOREJO
		612. SD NEGERI ARJOWINANGUN
		613. SD NEGERI KEDALEMAN KULON
		614. SD NEGERI MADUREJO
		615. SD NEGERI PESURUHAN
		616. SD NEGERI PURWOHARJO



NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
		617. SD NEGERI SIDODADI
		618. SD NEGERI SRUSUH JURU TENGAH
		619. SD NEGERI TUKINGGEDONG
		620. SD NEGERI WETON KULON
		621. SD NEGERI WETON WETAN
		622. SD NEGERI 1 GIYANTI
		623. SD NEGERI 2 GIYANTI
		624. SD NEGERI 3 GIYANTI
		625. SD NEGERI 4 GIYANTI
		626. SD NEGERI 5 GIYANTI
		627. SD NEGERI 1 KALISARI
		628. SD NEGERI 2 KALISARI
		629. SD NEGERI 1 KRETEK
		630. SD NEGERI 2 KRETEK
		631. SD NEGERI 1 PRINGTUTUL
		632. SD NEGERI 2 PRINGTUTUL
		633. SD NEGERI 1 SUKOMULYO
		634. SD NEGERI 2 SUKOMULYO
		635. SD NEGERI 3 SUKOMULYO
		636. SD NEGERI 4 SUKOMULYO
		637. SD NEGERI 1 WAGIRPANDAN
		638. SD NEGERI 2 WAGIRPANDAN
		639. SD NEGERI 3 WAGIRPANDAN
		640. SD NEGERI 1 WONOHARJO
		641. SD NEGERI 2 WONOHARJO
		642. SD NEGERI 3 WONOHARJO
		643. SD NEGERI 4 WONOHARJO
		644. SD NEGERI 2 BUMIAGUNG
		645. SD NEGERI 3 BUMIAGUNG
		646. SD NEGERI 1 ROWOKELE
		647. SD NEGERI 2 ROWOKELE
		648. SD NEGERI JATILUHUR
		649. SD NEGERI REDISARI
		650. SD NEGERI 1 PUCANGAN
		651. SD NEGERI 2 PUCANGAN
		652. SD NEGERI 1 SADANGKULON
		653. SD NEGERI 2 SADANGKULON
		654. SD NEGERI 1 SEBORO
		655. SD NEGERI 2 SEBORO
		656. SD NEGERI 3 SEBORO
		657. SD NEGERI 1 WONOSARI
		658. SD NEGERI 2 WONOSARI
		659. SD NEGERI CANGKRING
		660. SD NEGERI KALIGESING
		661. SD NEGERI KEDUNGGONG



NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
		662. SD NEGERI SADANGWETAN
		663. SD NEGERI 1 BEJIRUYUNG
		664. SD NEGERI 1 JATINEGARA
		665. SD NEGERI 2 JATINEGARA
		666. SD NEGERI 3 JATINEGARA
		667. SD NEGERI 1 KALIBEJI
		668. SD NEGERI 2 KALIBEJI
		669. SD NEGERI 3 KALIBEJI
		670. SD NEGERI 1 KEDUNGWRINGIN
		671. SD NEGERI 3 KEDUNGWRINGIN
		672. SD NEGERI 4 KEDUNGWRINGIN
		673. SD NEGERI 1 KENTENG
		674. SD NEGERI 2 KENTENG
		675. SD NEGERI 1 SAMPANG
		676. SD NEGERI 2 SAMPANG
		677. SD NEGERI 3 SAMPANG
		678. SD NEGERI 4 SAMPANG
		679. SD NEGERI 1 SELOKERTO
		680. SD NEGERI 2 SELOKERTO
		681. SD NEGERI 1 SEMALI
		682. SD NEGERI 2 SEMALI
		683. SD NEGERI 1 SEMPOR
		684. SD NEGERI 2 SEMPOR
		685. SD NEGERI 3 SEMPOR
		686. SD NEGERI 1 SIDOHARUM
		687. SD NEGERI 2 SIDOHARUM
		688. SD NEGERI 1 SOMAGEDE
		689. SD NEGERI 2 SOMAGEDE
		690. SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO
		691. SD NEGERI 2 TUNJUNGSETO
		692. SD NEGERI 3 TUNJUNGSETO
		693. SD NEGERI 4 TUNJUNGSETO
		694. SD NEGERI 1 DONOROJO
		695. SD NEGERI 2 DONOROJO
		696. SD NEGERI 3 DONOROJO
		697. SD NEGERI 4 DONOROJO
		698. SD NEGERI BONOSARI
		699. SD NEGERI KEDUNGBULUS
		700. SD NEGERI KEDUNGJATI
		701. SD NEGERI PEKUNCEN
		702. SD NEGERI 1 CONDONGCAMPUR
		703. SD NEGERI 2 CONDONGCAMPUR
		704. SD NEGERI 1 DONOSARI
		705. SD NEGERI 2 DONOSARI
		706. SD NEGERI 1 GIWANGRETNO



NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
		707. SD NEGERI 1 KARANGGEDANG
		708. SD NEGERI 2 KARANGGEDANG
		709. SD NEGERI 1 PAKURAN
		710. SD NEGERI 2 PAKURAN
		711. SD NEGERI 1 PANDANSARI
		712. SD NEGERI 2 PANDANSARI
		713. SD NEGERI 3 PANDANSARI
		714. SD NEGERI 4 PANDANSARI
		715. SD NEGERI 1 PANGEMPON
		716. SD NEGERI 1 SIDOAGUNG
		717. SD NEGERI 2 SIDOAGUNG
		718. SD NEGERI 3 SIDOAGUNG
		719. SD NEGERI 5 SIDOAGUNG
		720. SD NEGERI 1 SIDOHARJO
		721. SD NEGERI 2 SIDOHARJO
		722. SD NEGERI 1 SRUWENG
		723. SD NEGERI 2 SRUWENG
		724. SD NEGERI 1 TANGGERAN
		725. SD NEGERI 2 TANGGERAN
		726. SD NEGERI 1 TRIKARSO
		727. SD NEGERI 2 TRIKARSO
		728. SD NEGERI JABRES
		729. SD NEGERI KARANGJAMBU
		730. SD NEGERI KARANGPULE
		731. SD NEGERI KARANGSARI
		732. SD NEGERI KEJAWANG
		733. SD NEGERI KLEPUSANGGAR
		734. SD NEGERI MENGANTI
		735. SD NEGERI PENUSUPAN
		736. SD NEGERI PURWODESO
3.	Sekolah Menengah Pertama Negeri	1. SMP NEGERI 1 ADIMULYO
		2. SMP NEGERI 2 ADIMULYO
		3. SMP NEGERI 1 ALIAN
		4. SMP NEGERI 2 SATU ATAP ALIAN
		5. SMP NEGERI 1 AMBAL
		6. SMP NEGERI 2 AMBAL
		7. SMP NEGERI 1 AYAH
		8. SMP NEGERI 2 AYAH
		9. SMP NEGERI 3 SATU ATAP AYAH
		10. SMP NEGERI 1 BONOROWO
		11. SMP NEGERI 1 BUAYAN
		12. SMP NEGERI 2 BUAYAN
		13. SMP NEGERI 1 BULUSPESANTREN
		14. SMP NEGERI 2 BULUSPESANTREN



NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
		15. SMP NEGERI 1 GOMBONG
		16. SMP NEGERI 2 GOMBONG
		17. SMP NEGERI 3 GOMBONG
		18. SMP NEGERI 4 GOMBONG
		19. SMP NEGERI 1 KARANGANYAR
		20. SMP NEGERI 2 KARANGANYAR
		21. SMP NEGERI 3 KARANGANYAR
		22. SMP NEGERI 1 KARANGGAYAM
		23. SMP NEGERI 2 KARANGGAYAM
		24. SMP NEGERI 1 KARANGSAMBUNG
		25. SMP NEGERI 2 KARANGSAMBUNG
		26. SMP NEGERI 3 SATU ATAP KARANGSAMBUNG
		27. SMP NEGERI 4 SATU ATAP KARANGSAMBUNG
		28. SMP NEGERI 1 KEBUMEN
		29. SMP NEGERI 2 KEBUMEN
		30. SMP NEGERI 3 KEBUMEN
		31. SMP NEGERI 4 KEBUMEN
		32. SMP NEGERI 5 KEBUMEN
		33. SMP NEGERI 6 KEBUMEN
		34. SMP NEGERI 7 KEBUMEN
		35. SMP NEGERI 1 KLIRONG
		36. SMP NEGERI 1 KUTOWINANGUN
		37. SMP NEGERI 2 KUTOWINANGUN
		38. SMP NEGERI 3 KUTOWINANGUN
		39. SMP NEGERI 1 KUWARASAN
		40. SMP NEGERI 1 MIRIT
		41. SMP NEGERI 2 MIRIT
		42. SMP NEGERI 1 PADURESO
		43. SMP NEGERI 1 PEJAGOAN
		44. SMP NEGERI 2 PEJAGOAN
		45. SMP NEGERI 1 PETANAHAN
		46. SMP NEGERI 1 PONCOWARNO
		47. SMP NEGERI 2 SATU ATAP PONCOWARNO
		48. SMP NEGERI 1 PREMBUN
		49. SMP NEGERI 2 PREMBUN
		50. SMP NEGERI 1 PURING
		51. SMP NEGERI 2 PURING
		52. SMP NEGERI 1 ROWOKELE
		53. SMP NEGERI 2 ROWOKELE
		54. SMP NEGERI 1 SADANG
		55. SMP NEGERI 1 SEMPOR
		56. SMP NEGERI 2 SEMPOR



NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
		57. SMP NEGERI 3 SATU ATAP SEMPOR
		58. SMP NEGERI 1 SRUWENG
		59. SMP NEGERI 2 SRUWENG

B. DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NO	SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
1	2	3
1.	Sanggar Kegiatan Belajar	1. SKB PEJAGOAN

BUPATI KEBUMEN,

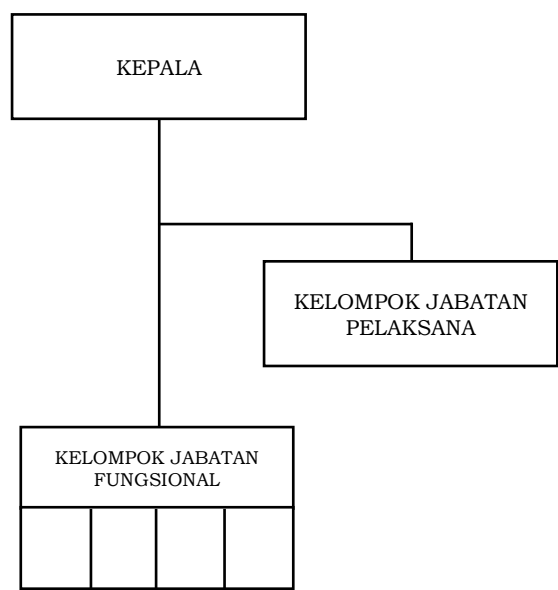
ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 138 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA SATUAN PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI



BUPATI KEBUMEN,

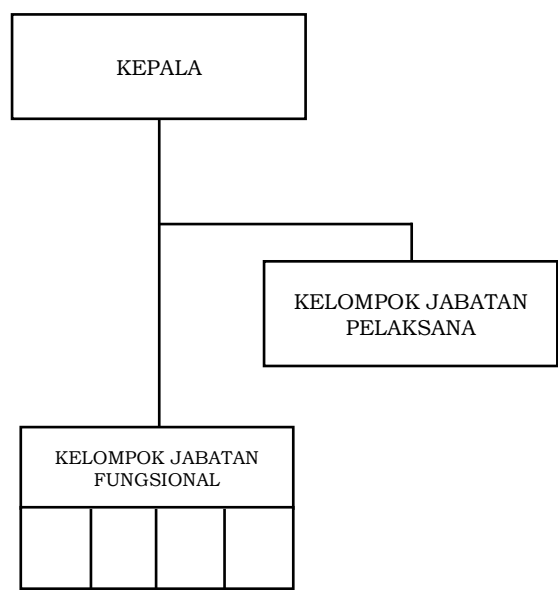
ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 138 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA SATUAN PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR NEGERI



BUPATI KEBUMEN,

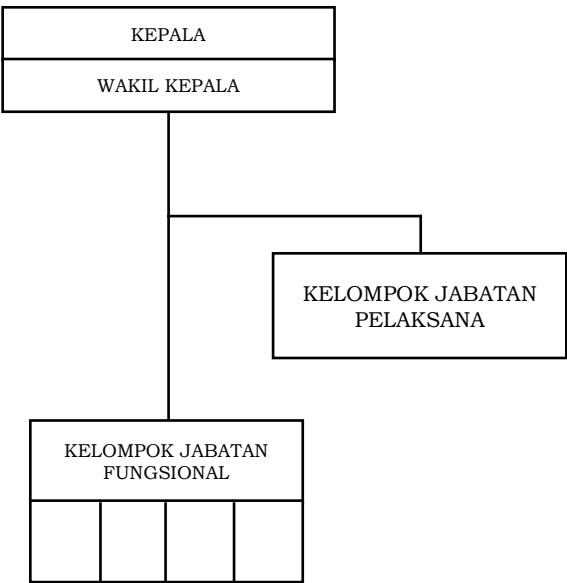
ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 138 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA SATUAN PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI



BUPATI KEBUMEN,

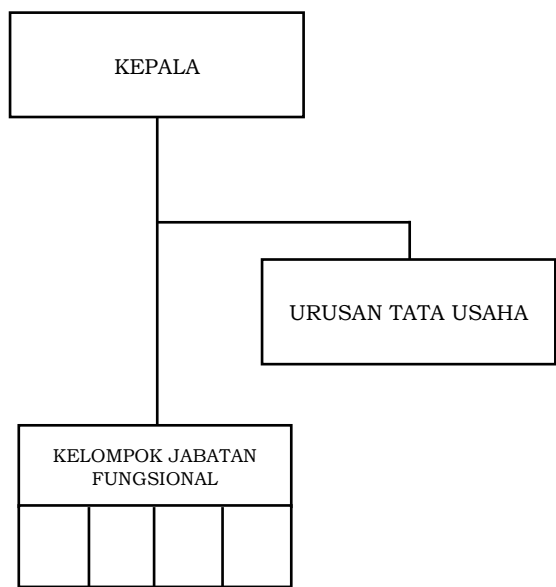
ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 138 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA SATUAN PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI KEBUMEN,

Ttd.

ARIF SUGIYANTO

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 421.2/034/XI/45/85.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kabupaten Kotamadya
Daerah Tingkat II : Kebumen tertanggal :
Nomor : 421.2/ 3338 tentang : Perubahan Penetapan SKSDN 64(45 SDN)

MENIMBANG :

1. bahwa pertumbuhan Sekolah Dasar jumlahnya semakin membesar, khususnya sebagai akibat adanya penambahan jumlah bangunan Sekolah Dasar berdasarkan Inpres SD ;
2. bahwa mengingat pertumbuhan tersebut angka 1 (satu), maka sudah dipandang perlu diadakan langkah heregristasi kembali dalam rangka untuk dapat menetapkan jumlah Sekolah Dasar Negeri yang telah ada secara pasti ;
3. sehubungan dengan angka 2 (dua) tersebut, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan pembaharuan Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri di Jawa Tengah .

MENGINGAT :

- a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Kekuasaan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 tentang tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang Pendidikan ;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 030 - 867 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Sensus Barang Daerah ;
- e. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepada Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta .
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta .
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian di Jakarta .
4. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang .
5. Kepala Bagian Ferbendaharaan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang .
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang .
7. Kepala Bagian Keuangan Kantor Pemda Tk. I Jawa Tengah di Semarang .
8. Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. Dati I Jateng Kab. / Kodya Dati II : Kebumen
9. Kepala Dinas P dan K Prop. Dati I Jateng Ranting / Kecamatan : Allan
10. Pengurus Yayasan
11. Bendel - bendel Keputusan

Sesuai dengan aslinya.

Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan dan Administrasi Per - Sekolah.

Dinas P dan K Prop. Daerah Tingkat I Jawa Tengah

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JATENG.

Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

ttd.

Drs. KARSEN O.

NIP. : 130.048.095



DAFTAR : LAMPIRAN SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 421.2/034/XI. /45/85 TANGGAL 1-Agustus-1985

No.	L A M A Sekolah Dasar	Telah sampai Kelas	B A R U Sekolah Dasar	Telah sampai kelas	Bertempat di Desa Kelurahan	Kecamatan / Ranting	Kab. /Kodya	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Alian I	VI	Alian I	VI	Alian	Alian	Kebumen	Th. Ber 1901
2.	" II	VI	" II	VI	"	"	"	Inp.10/73-6/74 1973
3.	" III	VI	" III	VI	"	"	"	Inp.3/77 1976
4.	" IV	VI	" IV	VI	"	"	"	Inp.10/73 1973
5.	Kalirancang I	VI	Kalirancang I	VI	Kalirancang	"	"	1920
6.	" II	VI	" II	VI	"	"	"	Inp.6/78 1964
7.	" III	VI	" III	VI	"	"	"	Inp.10/73 1920
8.	Sawangan I	VI	Sawangan I	VI	Sawangan	"	"	1974
9.	" II	VI	" II	VI	"	"	"	Inp.10/73 1967
10.	" III	VI	" III	VI	"	"	"	Inp.4/82 1983
11.	Wonokromo I	VI	Wonokromo I	VI	Wonokromo	"	"	1913
12.	" II	VI	" II	VI	"	"	"	1964
13.	" III	VI	" III	VI	"	"	"	Inp.5/81 1983
14.	Kaliputih I	VI	Kaliputih I	VI	Kaliputih	"	"	Inp.3/76 1926
15.	Tlogowulung I	VI	Tlogowulung I	VI	Tlogowulung	"	"	1927
16.	" II	VI	" II	VI	"	"	"	Inp.3/77 1964
17.	Seliling I	VI	Seliling I	VI	Seliling	"	"	1970
18.	" II	VI	" II	VI	"	"	"	Inp.6/78 1978
19.	" III	VI	" III	VI	"	"	"	Inp.6/75 1917
20.	Surotrunan I	VI	Surotrunan I	VI	Surotrunan	"	"	1978
21.	" II	VI	" II	VI	"	"	"	Inp.6/80 1978
22.	Bojongsari I	VI	Bojongsari I	VI	Bojongsari	"	"	Inp.3/76 1953
23.	Banjaran I	VI	Banjaran I	VI	Banjaran	"	"	Inp.6/75 1928
24.	" II	VI	" II	VI	"	"	"	1982
25.	Blater	VI	Blater	VI	Blater	"	"	Inp.3/76 1976
26.	Poncwarno	VI	Poncwarno	VI	Poncwarno	"	"	Inp.3/76 1909
27.	Tegalrejo	VI	Tegalrejo	VI	Tegalrejo	"	"	1917
28.	Jembangan I	VI	Jembangan I	VI	Jembangan	"	"	Inp.6/75 1926
29.	" II	VI	" II	VI	"	"	"	Inp.6/75 1975
30.	Karangtengah I	VI	Karangtengah I	VI	Karangtengah	"	"	1982
31.	" II	VI	" II	VI	"	"	"	Inp.5/81 1982
32.	Karangkembang I	VI	Karangkembang I	VI	Karangkembang	"	"	1920
33.	" II	VI	" II	VI	"	"	"	1977
34.	Karangtanjung I	VI	Karangtanjung I	VI	Karangtanjung	"	"	1920
35.	" II	VI	" II	VI	"	"	"	Inp.5/81 1982
36.	Kalijoyo I	VI	Kalijoyo I	VI	Kalijoyo	"	"	Inp.6/75 1920
37.	" II	VI	" II	VI	"	"	"	Inp.6/75 1976
38.	Kebapangan	VI	Kebapangan	VI	Kebapangan	"	"	Inp.6/76 1964
39.	Tirtomoyo	V	Tirtomoyo	V	Tirtomoyo	"	"	Inp.6/75 1926
40.	Kambang Sari	VI	Kambang Sari	VI	Kambang Sari	"	"	1921
41.	Tanuharjo	VI	Tanuharjo	VI	Tanuharjo	"	"	Inp.6/74 1962
42.	Jatimulyo	VI	Jatimulyo	VI	Jatimulyo	"	"	1964
43.	Soka	VI	Soka	VI	Soka	"	"	Inp.3/77 1977
44.	Jatipurus	VI	Jatipurus	VI	Jatipurus	"	"	Inp.3/77 1978
45.	Lerepkebumen	VI	Lerepkebumen	VI	Lerepkebumen	"	"	Inp.3/77 1950

Sesuai dengan salinannya.

Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan dan
Administrasi Per - Sekolah.
Dinas P dan K Prop. Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah



NIP: 500 037 830.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JATENG.
Kepala Dinas P dan K Propinal Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

ttd.

DR. KARSEN
NIP. 130.048.095



BUPATI KEBUMEN

PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 421.2 /**2322** TAHUN 2019

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KARANGTANJUNG
KECAMATAN ALIAN DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KARANGTANJUNG
KECAMATAN ALIAN MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGTANJUNG
KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas kegiatan proses pembelajaran pada tingkat Sekolah Dasar Negeri 1 Karangtanjung dan Sekolah Dasar Negeri 2 Karangtanjung Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Nomor : 800/9624.1, Tanggal 11 November 2019, Hal : Telaahan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen atas Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu dilakukan penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri 1 Karangtanjung Kecamatan Alian dan Sekolah Dasar Negeri 2 Karangtanjung Kecamatan Alian Menjadi Sekolah Dasar Negeri Karangtanjung Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Negara Republik I

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan (Berita Negara Rep

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri 1 Karangtanjung Kecamatan Alian dan Sekolah Dasar Negeri 2 Karangtanjung Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen menjadi Sekolah Dasar Negeri Karangtanjung Kecamatan Alian dengan data sebagai berikut:
NPSN : 20305354
Alamat : Dukuh Sokaprayan Karangtanjung Kecamatan Alian
- KEDUA : Menutup Sekolah Dasar Negeri 2 Karangtanjung Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dengan data sebagai berikut:
NPSN : 20305698
Alamat : Desa Karangtanjung Kecamatan Alian
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI KEBUMEN

YAZID MAHFUDZ

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen Pemerintahan Umum Otonomi Daerah;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Kabupaten Kebumen;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
8. Camat Alian;
9. Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Alian;
10. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Alian;
11. Kepala Sekolah Dasar Negeri Karangtanjung